

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN SARANA PENAMPUNGAN AIR BERSIH: STUDI KASUS DESA TESA, KECAMATAN LAEN MANEN, KABUPATEN MALAKA

Egidius Fkun¹, Elpius Kalembang², Handrianus Vianey Melin Wula³, Februnia Bete Kehi⁴

¹²³⁴Universitas Timor Kefamenanu, Indonesia

¹egifkun6@gmail.com, kalembangelpius@gmail.com,
handrywula@unimor.ac.id, ebruniabetekehi@gmail.com⁴

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4148>

Received: 13 Desember 2024

Revised: 14 Mei 2025

Accepted: 14 Mei 2025

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tesa dalam penyediaan prasarana penampungan air bersih (fiber) bagi masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat adalah terbatasnya prasarana air bersih serta keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam menyediakan prasarana penampungan air bersih, dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemerintah desa telah melakukan perencanaan penyediaan fiber bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, dengan pelaksanaan secara bertahap setiap tahun; (2) pemerintah membentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari kepala dusun, ketua RT, dan ketua RW untuk membantu proses distribusi fiber; (3) pemerintah menggerakkan proses pelaksanaan agar penyediaan fiber tepat waktu dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga; serta (4) pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan fiber, meskipun tidak dilakukan secara intensif karena adanya kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga sarana tersebut secara mandiri. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran dan jangkauan pelayanan. Saran yang diajukan antara lain peningkatan alokasi dana desa untuk program air bersih, penguatan pengawasan partisipatif, serta kerja sama lintas sektor guna mendukung penyediaan air bersih secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, penyediaan Air Bersih, Fiber

Abstract

This study examines the strategies implemented by the Village Government of Tesa in providing clean water storage infrastructure (fiber tanks) for the community. The main issue addressed is the limited availability of clean water facilities and the restricted access to clean water among residents. The objectives of this research are: (1) to identify the strategies of the village government in providing clean water storage infrastructure, and (2) to explore the efforts made by the government to overcome clean water shortages. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that: (1) the village government has planned the provision of fiber tanks for communities facing water scarcity, with implementation

carried out gradually each year; (2) the government has established an implementation team consisting of hamlet heads, neighborhood heads (RT), and community unit leaders (RW) to assist in the distribution process; (3) the government actively facilitates the implementation process to ensure timely provision and household utilization of the fiber tanks; and (4) the government oversees the use of the fiber tanks, although supervision is not conducted intensively, as responsibility is entrusted to the community to maintain the facilities independently. The findings conclude that the village government's strategy has been relatively effective, despite budget constraints and limited service coverage. Suggested improvements include increasing village fund allocation for clean water programs, strengthening participatory supervision, and fostering cross-sector collaboration to support sustainable clean water provision.

Keywords: Fiber Tanks, Clean Water Provision, Government Strategy

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi manusia yang memiliki nilai vital dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas air akan memengaruhi kondisi dan kasus sehat atau sakit dari masyarakat (Abd. Gafur et al., 2022). Bagi manusia, kebutuhan air sangat mutlak karena sebenarnya zat pembentuk tubuh manusia sebagian terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 80% dari bagian tubuh (Kornita, 2020). Kebutuhan akan air bersih tidak hanya terbatas pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas umum, kegiatan sosial, dan aktivitas ekonomi (Leki, 2021). Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan dinamika sosial masyarakat, terjadi peningkatan permintaan terhadap air bersih yang cukup signifikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang sulit.

Ketersediaan air bersih yang terbatas telah menjadi salah satu isu krusial dalam kebijakan sosial di Indonesia. Krisis air bersih masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Penyediaan air bersih di Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari keterbatasan sumber daya, infrastruktur, hingga kondisi geografis

yang kurang mendukung (Qodriyatun, 2014).

Air tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian integral dari ekosistem yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Desti & Ula, 2021). Dalam konteks ketatanegaraan, air termasuk dalam kategori sumber daya strategis yang pengelolaannya diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlindungan dan keberlanjutan akses terhadap air bersih menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Kondisi krisis air bersih juga dirasakan oleh masyarakat Desa Tesa, yang hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Lokasi sumber air yang berada cukup jauh dari permukiman, sekitar 1 hingga 2 kilometer, menyebabkan masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh setiap harinya hanya untuk mendapatkan air bersih. Kesulitan ini diperparah oleh kondisi geografis desa yang berada di daerah ketinggian dengan kontur tanah yang tidak mendukung pembangunan saluran air konvensional seperti pipa.

Pemerintah desa sempat mengupayakan pengadaan infrastruktur perpipaan, namun gagal terealisasi secara optimal karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah desa perlu merumuskan strategi alternatif untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui penyediaan prasarana penampungan air bersih berbahan fiber, yang diharapkan menjadi solusi jangka menengah bagi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

Hal ini membuat pemerintah mencari cara lain, yakni mengadakan prasarana tempat penampung air bersih (fiber) bagi masyarakat Desa Tesa. Upaya ini dilakukan melalui musyawarah bersama dengan aparat desa dan masyarakat dan sudah dimulai sejak tahun 2023. Pemerintah menggunakan langkah ini karena dianggap lebih menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengakses air bersih walaupun masyarakat perlu membayar dengan harga Rp. 175.000 per tanki. Harga ini relatif mahal namun tidak menjadi persoalan besar bagi masyarakat karena pemanfaatan fiber tersebut sudah dibagi 5 KK untuk 1 fiber, sehingga tiap KK mengumpulkan uang sebesar Rp. 35.000 untuk membeli air bersih. Memang kapasitas fiber hanya 2.200 liter tapi penggunaan bisa sampai 1 bulan karena air tersebut hanya digunakan untuk mencuci piring, masak dan untuk diminum. Sedangkan untuk mandi dan mencuci pakaian masyarakat mencari sumber air di tempat lain. Pemerintah Desa Tesa memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditawar-tawar untuk turut campur tangan dalam menyusun strategi untuk mengatasi krisis air bersih tersebut.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan strategi pemerintah Desa Tesa dalam mengatasi krisis air bersih yang

dihadapi masyarakat melalui penyediaan fiber, dan apa saja kendala serta solusi dalam implementasi strategi penyediaan air bersih.

Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemerintah Desa Tesa, peneliti menganalisisnya menggunakan pendekatan strategi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu rencana yang diambil untuk mengatur arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupannya bermasyarakat. Strategi yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Strategi menjadi landasan bagi tujuan organisasi serta metode dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Reksohadiprodjo, 2010). Jadi strategi adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan dan sumber daya organisasi dengan baik untuk mencapai tujuan melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan, terutama dalam situasi yang menguntungkan (Salusu, 2006).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan strategi George R. Terry (2008), yang mengemukakan bahwa strategi dalam organisasi atau pemerintahan harus memenuhi empat unsur pokok, yakni: *perencanaan*: yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan cara mencapainya secara sistematis; *pengorganisasian*: yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya manusia dan material secara efisien; *penggerakan*: yang berkaitan dengan tindakan untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana; dan *pengawasan*: yang berkaitan dengan monitoring untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif yang mengikuti paradigma fenomenologi. Pendekatan kualitatif dalam pengkajian mengumpulkan informasi berupa deskripsi

verbal atau teks, dan tingkah laku yang dapat diperhatikan dari perorang atau komunitas yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan makna yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman mereka dengan lebih mendalam (Hamid, 2015).

Penelitian fenomenologi dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan masalah yang diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi pada objek penelitian serta pengalaman informan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan masalah secara detail, menyeluruh, dan mendalam.

Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada peran dan strategi pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Desa Tesa, secara khusus pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

Sumber Data Dan informan

Sumber data merupakan asal atau titik awal dari informasi yang diperoleh. Kualitas sebuah studi sangat dipengaruhi oleh kualitas alat atau instrumen penelitian serta metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, data utama berasal dari ucapan dan tindakan yang dapat diamati, sedangkan sumber data tambahan meliputi dokumen dan jenis data lainnya (Moleong, 2017).

Data dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kategori yang berbeda, yakni Data primer, dimana informasi didapatkan secara langsung dari objek melalui wawancara,; dan data sekunder, dimana informasi diperoleh oleh peneliti dari sumber lain, seperti media massa, jurnal, dokumen, laporan, atau artikel yang relevan dengan subjek penelitian. Sedangkan informan penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki, yakni kepala desa, kepala

dusun, ketua RT dan masyarakat penerima bantuan sebanyak 8 orang.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang melibatkan empat tahapan yakni, pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Miles, 2014). Kesimpulan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk hasil temuan naratif (Palupi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Tesa

Desa Tesa merupakan salah satu dari 9 (sembilan) desa di kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dalam buku RPJMDes 2023-2029 Desa Tesa merupakan pecahan dari Desa Kusa yang pada awalnya terdiri dari empat dusun. Dari empat dusun tersebut, dua dusun kemudian memisahkan diri dan membentuk desa baru, yakni Dusun Hoineno dan Dusun Meotroi. Hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penduduk dari waktu ke waktu yang terus meningkat yang berdampak pada pelayanan pemerintahan Desa Kusa yang tidak maksimal terhadap masyarakat, maka pada tahun 1994 para tokoh masyarakat dari empat Dusun berinisiatif untuk memisahkan Dusun Hoineno dan Dusun Dusun Meotroi menjadi sebuah desa baru dengan nama Desa Tesa, guna mendekatkan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap masyarakat. Dalam perjalanannya menjadi desa persiapan selama kurang lebih (6) tahun, seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swadaya oleh

masyarakat bersama Bapak Yakobus Atok selaku kepala desa persiapan Desa Tesa yang dipilih secara demokratis pada tahun 1994. Dan pada tahun 2000 Desa Tesa berubah status dari desa persiapan menjadi desa definitif yang dipimpin oleh kepala

desa terpilih yaitu bapak Daniel Moruk pada tahun 2000 sampai 2012.

Secara ringkas kepemimpinan di Desa Tesa terhitung sejak terbentuk sampai dengan kondisi saat ini, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Nama Kepala Desa Tahun 1994-2029

No	Nama Pejabat	Jabatan	Priode Jabatan(Tahun)	Keterangan
1	Yakobus Atok	Kepala Desa	1994 s.d 2000	Kepala desa persiapan
2	Daniel Moruk	Kepala desa	2000 s.d 2012	Kepala desa
3	Marten Molo	Kepala desa	2013 s.d 2019	Kepala desa
4	Rofina Liku, S.Ip	Pj kepala desa	2019 s.d 2021	Penjabat desa
5	Antonius Tele, S.Sos	Pj kepala desa	2022 s.d 2023	Penjabat desa
6	Wenselaus Klau Seran	Kepala Desa	2023 s.d 2029	Kepala desa

Sumber : Data Olahan RPJMDes 2023-2029

Dari aspek kependudukan, jumlah penduduk Desa Tesa sebanyak 2.365 jiwa yang terdiri dari 1.206 jiwa laki-laki dan 2.356 jiwa perempuan. Dari aspek pendidikan, keadaan penduduk Desa Tesa

didominasi oleh kelompok yang hanya tamat SD (366 jiwa), putus sekolah dan buta huruf (793 jiwa), dan belum sekolah (289 jiwa). Secara lebih rinci tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2 Data Pendidikan Penduduk Desa Tesa

No	Pendidikan Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Belum sekolah	289
2	Tidak tamat SD/ sederajat	264
3	Tamat SD/ sederajat	366
4	Tamat SLTP	292
5	Tamat SLTA	483
6	Tamat perguruan tinggi	142
7	Buta aksara/ Buta huruf	259
8	DO/ Putus sekolah	270
	Jumlah	2.365

Sumber : Data Olahan RPJMDes 2023-2029

Dari aspek mata pencaharian, masyarakat Desa Tesa banyak yang bekerja sebagai petani (1.172 jiwa), sedangkan yang paling

sedikit adalah TNI/Polri (2 jiwa). Secara lebih rinci tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani/peternak	1.172
2	Tukang Kayu	45
3	Tukang Batu	65
4	Pedagang kaki lima	34
5	TNI/POLRI	2
6	PNS	23
7	Guru	28

8	Pengusaha	12
9	Pensiunan PNS	21
10	Pensiunan TNI/POLRI	29
11	Pengrajin industry	30
12	Lainya	904
	Jumlah	2.365

Sumber: Data Olahan RPJMDes 2023-2029

Strategi Pemerintah Desa Tesa

Strategi pemerintah desa adalah rencana jangka menengah dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dalam bidang sosial, ekonomi, atau politik. Ini melibatkan perencanaan untuk menetapkan tujuan, merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengevaluasi hasilnya. Dalam hal ini pemerintah Desa Tesa mengupayakan prasarana bagi masyarakat dengan menggunakan 4 strategi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

a. Perencanaan

Pada aspek perencanaan, pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin menyediakan sarana penampungan air bersih berupa fiber kepada masyarakat yang kekurangan air bersih namun tidak semua mendapatkan prasana tersebut dikarena pemerintah akan melakukan pembagian prasarana fiber kepada masyarakat secara bertahap. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan prasarana tersebut bisa bekerja sama dengan masyarakat yang sudah mendapatkan sehingga kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fiber tambahan dilakukan melalui musyawarah desa bersama kepala desa dan BPD. Usaha ini didahului dengan melakukan musyawarah dusun bersama masyarakat yang kekurangan air bersih. Dalam musyawarah dusun tersebut dilakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat

terkait kebutuhan riil dan penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hasil dari musyawarah dusun yang dilakukan kepala desa menyepakati bahwa empat dusun yang kekurangan air bersih akan diadakan prasarana fiber secara bertahap. Prioritas pemberian fiber bukan didasarkan pada aspek ekonomi (mampu atau tidak) tetapi lebih kepada yang benar-benar membutuhkan air bersih tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Adisasmita, 2011) bahwa perencanaan adalah langkah untuk mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat dan mengevaluasi hasil yang dicapai melalui tanggapan yang teratur dan terorganisir. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan prasarana fiber, akan bekerja sama dengan masyarakat yang sudah mendapatkan prasarana fiber tersebut untuk mendapatkan air bersih.

b. Pengorganisasian

Pada aspek pengorganisasian pemerintah membentuk organisasi di empat dusun tersebut yang terdiri dari kepala dusun, dan RT/RW. Tujuan pembentukan ini agar bisa membangun komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dalam pendistribusian, pengawasan dan pelestarian prasarana fiber tersebut. Pembentukan kelompok organisasi ini memiliki dua manfaat yakni intra (ke dalam) dan extra (ke luar). Manfaat intra yang diperoleh yakni dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi masalah infrastruktur. Sedangkan manfaat ekstra yang diperoleh yakni terjalinnya sinergitas atau kolaborasi antara pemerintah desa

dan masyarakat dalam pengelolaannya. Selain itu juga terjadi kolaborasi dengan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat juga dapat memberikan dana untuk melancarkan kegiatan tersebut, sehingga dapat saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tesa.

Menurut Juhri, (2006) pengorganisasian adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja secara efektif dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Oleh karena itu pengorganisasian ini sesuai dengan teori (George R. Terry, 2008) yang menyatakan bahwa pengorganisasian adalah proses untuk menentukan, mengelompokkan, dan menyusun berbagai kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Hal ini melibatkan penempatan sumber daya manusia (pegawai) pada tugas-tugas yang sesuai, penyediaan fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk pekerjaan, serta penetapan hubungan wewenang di antara individu dalam organisasi. Dengan demikian setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tersebut dapat membantu melancarkan proses penyediaan prasarana fiber bagi masyarakat.

c. Pergerakan

Pada aspek pergerakan, pemerintah melakukan pendistribusian fiber kepada masyarakat. Pembagian fiber dari pemerintah kepada masyarakat ini berjalan dengan tertib dan lancar karena pemerintah terjun langsung ke masyarakat. Keterlibatan atau kehadiran pemerintah menjadi tanda bahwa pemerintah ikut berempati dan bersolider dengan masyarakat. Selain itu, kehadiran atau keterlibatan pemerintah desa juga adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesuai prosedur,

tepat sasaran dan tepat manfaat. Pemerintah memastikan bahwa fiber-fiber tersebut juga sudah ditempatkan sesuai dengan titik yang telah disepakati bersama. Selain itu, pemerintah juga terus aktif memberikan dorongan kepada masyarakat agar tetap berkomitmen dan konsisten dalam mengumpulkan iuran untuk membeli air tanki.

Hal ini sesuai dengan teori (George R. Terry, 2008) yang menyatakan bahwa penggerakan merupakan usaha untuk membangkitkan semangat dan mendorong seluruh anggota kelompok agar bertekad dan berusaha dengan penuh dedikasi untuk mencapai tujuan. Semua ini dilakukan dengan tulus dan sesuai dengan perencanaan serta upaya pengorganisasian yang telah disusun oleh pimpinan. Pimpinan memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap anggota bergerak dengan seiring dan bekerja keras untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan

Pada aspek pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap prasarana fiber yang telah dibagi kepada masyarakat. Namun pengawasan dari pemerintah tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena pemerintah kemudian memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat fiber mereka masing-masing. Menurut (Miftahur Rahmah, 2021), pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan tercapainya kinerja yang baik dan mendukung pencapaian visi serta misi organisasi secara lebih menyeluruh.

Hambatan dan Solusi

Dalam pelaksanaan strategi penyediaan air bersih di Desa Tesa, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa maupun masyarakat, antara lain:

a. Kondisi geografis yang menantang.

Desa Tesa berada di daerah perbukitan dengan kontur tanah yang tidak mendukung pembangunan saluran perpipaan secara konvensional. Hal ini menyulitkan distribusi air dari sumber ke permukiman warga, terutama karena jarak sumber air yang mencapai 1–2 kilometer.

- b. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

Upaya awal pembangunan sistem perpipaan gagal karena medan yang curam dan tanah yang tidak stabil, menyebabkan sistem distribusi air tidak berfungsi secara optimal. Selain itu, desa belum memiliki fasilitas penampungan dan distribusi air bersih yang memadai.

- c. Keterbatasan anggaran desa.

Pemerintah desa menghadapi keterbatasan dana untuk membiayai proyek air bersih berskala besar. Dana desa yang tersedia harus dibagi untuk berbagai sektor, sehingga program air bersih harus dicari bentuk alternatif yang lebih terjangkau.

- d. Ketergantungan terhadap musim.

Ketersediaan air dari sumber alam sangat tergantung pada musim. Di musim kemarau, debit air berkurang drastis, dan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih dalam jumlah cukup.

- e. Partisipasi masyarakat yang belum merata.

Meskipun sebagian warga aktif dalam kegiatan musyawarah dan iuran pembelian air, masih ada sebagian warga yang pasif atau belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan bersama fasilitas penampungan air.

Untuk menjawab berbagai hambatan di atas, pemerintah desa bersama masyarakat menerapkan beberapa solusi praktis, di antaranya:

- a. Penyediaan penampungan air berbahan fiber.

Pemerintah desa menyediakan tangki air berbahan fiber berkapasitas 2.200 liter untuk kelompok warga (1 fiber untuk 5 KK). Solusi ini dipilih karena lebih efisien secara biaya dan sesuai dengan kondisi geografis desa.

- b. Pembagian biaya secara kolektif.

Harga satu tangki air yang mencapai Rp175.000 ditanggung bersama oleh 5 kepala keluarga, sehingga masing-masing cukup membayar Rp35.000. Skema ini dianggap adil dan terjangkau oleh masyarakat.

- c. Pemanfaatan air sesuai prioritas.

Air bersih dari fiber digunakan hanya untuk kebutuhan esensial seperti minum, memasak, dan mencuci peralatan makan. Untuk mandi dan mencuci pakaian, warga menggunakan sumber air alternatif seperti sungai yang jaraknya 1-2 Km.

- d. Musyawarah desa sebagai sarana pengambilan keputusan.

Pemerintah desa rutin mengadakan musyawarah bersama tokoh masyarakat untuk menyepakati kebijakan terkait akses air bersih, distribusi, dan iuran. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi konflik.

- e. Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Pemerintah desa juga berupaya merancang program air bersih yang berkelanjutan, seperti penjajakan kerja sama dengan pemerintah kabupaten atau lembaga non-pemerintah untuk bantuan teknis dan infrastruktur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Desa Tesa dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan sumber daya yang tersedia. Strategi tersebut mencakup empat aspek utama menurut George R. Terry (2008): perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan. Dalam praktiknya, pemerintah desa mengupayakan penyediaan sarana penampung air bersih berbahan fiber sebagai solusi jangka menengah yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat.

Namun demikian pelaksanaan strategi ini tidak lepas dari sejumlah hambatan, seperti kondisi tanah yang tidak memungkinkan pembangunan saluran pipa, keterbatasan anggaran desa, ketergantungan terhadap musim, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Kendala-kendala ini berhasil direspons melalui solusi adaptif, seperti pembagian tangki antar lima kepala keluarga, pembiayaan kolektif, dan penguatan musyawarah desa untuk mendukung pengambilan keputusan yang inklusif. Keberhasilan sebagian dari strategi ini menegaskan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran:

- a. Bagi Pemerintah Desa.
Diharapkan agar pemerintah Desa Tesa menyusun rencana jangka panjang terkait penyediaan air bersih dengan dukungan teknis dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Pengembangan sistem pemanenan air hujan atau pemanfaatan teknologi sederhana dapat menjadi alternatif yang relevan dengan kondisi desa.
- b. Bagi Masyarakat Desa Tesa.
Perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih, baik melalui gotong royong, pengawasan bersama, maupun pembagian tanggung jawab secara kolektif.
- c. Bagi Pemerintah Daerah.
Pemerintah kabupaten perlu memberikan dukungan teknis dan anggaran dalam program penyediaan air bersih di wilayah pedesaan,

termasuk Desa Tesa. Penyediaan tenaga ahli, survei geologi, dan bantuan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sistem distribusi air yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gafur, Abd., Hamzah, W., & Syam, N. (2022). Pemanfaatan Sumber Air Bersih Yang Sehat Bagi Masyarakat Di Desa Pucak Kec. Tompobulu, Kab. Maros. *Window of Community Dedication Journal*, 3 (1), 186-195. <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/wocd/article/view/wocd3105>
- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Desti, I., & Ula, A. (2021). Analisis Sumber Daya Alam Air. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3 (2), 17–24. <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70900>
- Hamid, F. (2015). Pendekatan Fenomenologi. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(November), 17–33.
- Juhri. (2006). *Perspektif Manajemen Pendidikan*. Lampung: PT. Panji Grafika.
- Kornita, S. E. (2020). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap Air Bersih di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 166–181. DOI: <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1883>.
- Leki, A. (2021). *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kekurangan Air Bersih Di Desa Ta'aba Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka*. Kefamenanu: Universitas Timor.
- Miles, B. M. dan M. H. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Palupi, L. R. (2018). Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Malang. In *Jurnal Ilmu Administrasi*. Universitas Brawijaya.
- Rahmah, Miftahur. 2021. *Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Naumbai Kabupaten Kampar Tahun 2019-2020*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Reksohadiprodjo, S. 2010. *Manajemen Strategi (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, George R. 2008. *Prinsip-prinsip Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Qodriyatun, S. N. (2014). Kebijakan Sosial Untuk Mengatasi Krisis Air Bersih. *Info Singkat*, VI(20), 9–12. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-20-II-P3DI-Oktober-2014-19.pdf